

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HILMAN LATIEF**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **847167**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **12.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/350 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/175 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/80 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 35000 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m²/110 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **23.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX KING 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **140.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **712.657.209****F. HARTA LAINNYA** Rp. **184.000.000****Sub Total** Rp. **13.109.657.209****III. HUTANG** Rp. **200.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **12.909.657.209**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.